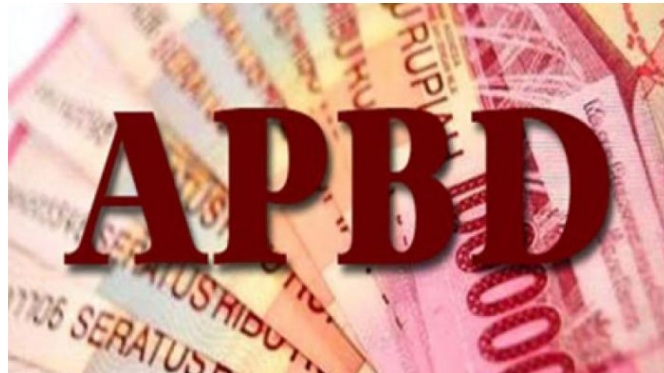


Imbas SILPA Salah Hitung, Bupati Pilih Kurangi Kunker



Ilustrasi: www.depoknews.id

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Berkurangnya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa)¹⁾ dari APBD Bantul 2015 karena salah hitung membuat Pemkab Bantul harus membuat beberapa penyesuaian dalam program-program di tahun 2016 ini.

Bupati Bantul, Suharsono mengungkapkan baru akan membahas permasalahan tersebut setelah mengumpulkan semua kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Bantul.

Meski begitu, Suharsono mengungkapkan berencana mengurangi program-program yang kurang prioritas seperti kunjungan kerja ke luar.

"Jadi saya akan mengirit, program saya ke luar-luar akan dikurangi, kalau tidak juga tidak apa-apa," ujarnya pada Senin (29/2/2016).

Suharsono mengungkapkan akan mengikuti aturan yang ada, karena pada 2016 ini di awal pemerintahannya tinggal melaksanakan kebijakan pemerintahan terdahulu yang sudah ada dalam APBD 2016 yang ditetapkan sebelum dirinya terpilih.

Meski begitu jika harus mengurangi program, kunjungan kerja menurutnya kurang prioritas dibanding peningkatan kesejahteraan.

"Jadi tadi sudah saya sampaikan, saya usahakan daripada kunjungan kerja lebih baik saya kurangi untuk kesejahteraan anggota saya (PNS)," tuturnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, SILPA APBD Bantul 2015 yang tercantum dalam APBD Bantul 2016 sekitar Rp 285 milyar, karena salah hitung berkurang sekitar Rp 41 milyar.

Kesalahan tersebut baru diketahui pada Januari 2016. Karena salah hitung tersebut beberapa program Pemkab pada tahun 2016 terancam harus dikurangi.

Kondisi tersebut juga mendapat tanggapan dari pihak legislatif, Ketua Fraksi PKB DPRD Bantul, Subhan Nawawi mengungkapkan mendorong adanya klarifikasi dari Pemkab Bantul atas isu yang beredar mengiringi salah hitung Silpa tersebut.

"Ini kan negara jadi harus dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Untuk menentukan langkah selanjutnya apakah ada hak yang bisa dipakai dewan terhadap permasalahan tersebut menurutnya mereka tetap perlu menunggu penjelasan dari pemkab sehingga duduk perkara akan lebih jelas. "Kita menunggu seperti apa penjelasannya masuk akal tidak," tuturnya.

Sumber berita:

1. Tribunjogja.com, 4 Maret 2016: Imbas Silpa salah hitung, Bupati pilih kurangi Kunker
2. Jawa Pos, 4 Maret 2016: Suharsono Perintahkan tunda Kunker, imbas salah hitung silpa

Catatan berita:

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 8 berbunyi: Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 1 ayat 11 berbunyi: Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan program kerja pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 diperkirakan akan mengurangi program – program yang kurang prioritas seperti kunjungan kerja ke luar negeri dengan demikian dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul. Hal ini dikatakan Suharsono setelah ada kesalahan dalam menghitung sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sekitar Rp 41 milyar.

Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pada tahun berjalan (SiLPA) merupakan sumber penerimaan internal Pemda yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Bentuk penggunaan SiLPA ada dua yakni:

1. untuk melanjutkan kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya (luncuran).
2. membiayai kegiatan baru yang tidak teranggarkan dalam APBD murni.

- 1) *SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.*